



## LRT Mulai Dibangun September

**JAKARTA** – Wacana pembangunan moda transportasi massal *light rail transit* (LRT) tampaknya bukan isapan jempol belaka. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT akan dibentuk Juni mendatang. Pada September proyek transportasi massal tahap pertama di koridor Kelapa Gading-Kebayoran Lama mulai dilakukan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, besok pihaknya akan menggelar rapat persiapan pembentukan BLUD. Nanti kewenangan BLUD berada di bawah Dinas Perhubungan. "Kan Juni dibentuk nih BLUD, Juli sudah lelang. September kerja sampai November. Desember laporan pertanggungjawaban pengerjaan dan lelang untuk pengerjaan tahun depan," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota kemarin.

Heru menjelaskan, pada tahap pertama pembangunan koridor LRT Kelapa Gading-Keba-

**"Kan Juni dibentuk nih BLUD, Juli sudah lelang. September kerja sampai November."**

### HERU BUDI HARTONO

Kepala BPKAD  
DKI Jakarta

yoran Lama itu dilakukan dari Kelapa Gading hingga Kebon Sirih. Berdasarkan penghitungan dibutuhkan dana sekitar Rp2 triliun. Namun, tahap awal ini Heru hanya menganggarkan Rp1 triliun pada anggaran perubahan 2015.

Berdasarkan hitungan kasar, Heru menyebutkan, setidaknya diperlukan anggaran Rp35 triliun untuk pembangunan fisik di tujuh koridor dengan jarak 70 kilometer. Besaran anggaran tersebut nanti semuannya dari APBD DKI Ja-

karta. "Dibiayin APBD aja cukup kok," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini rencana pembangunan LRT sudah sampai tahap pengkajian para ahli, termasuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pembangunan LRT dikerjakan secara bertahap dengan anggaran *single years* mengingat anggaran perubahan 2015 dengan peraturan gubernur (pergub) jelas melarang pembangunan secara *multi years*.

Ahok menjelaskan, dalam membangun transportasi umum tidak mungkin ditanggung semua oleh pihak swasta. Apabila pembangunan dilakukan swasta, pemerintah harus menyerahkan semua tanah miliknya ke pemilik proyek. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun sekitar 70-80% khusus infrastruktur dan sisanya baru diberikan ke swasta.

● bima setiyadi